

## PERSEPSI YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survey pada Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara)

**Silvia dan Sri Wahyuni**

Program Studi Akuntansi  
STIE Lhokseumawe

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of organizational commitment, the application of government accounting standards, and regional financial accounting information system to the quality of financial statements at the government apparatus of North Aceh Regency. Data was used in this study is primary of data by dividing questionnaires to 151 apparatus of government as a sample of this research. Data processing is done through multiple linear equations model. The results showed that: In partial organizational commitment has no significant effect to the quality of financial statements, the application of government accounting standards significantly influence to the quality of financial statements and utilization of financial accounting information system has significant effect to the quality of financial statements at the government apparatus of North Aceh Regency. Simultaneously organizational commitment, the application of government accounting standards and utilization of regional financial accounting information system have a significant effect to the quality of financial statements at government apparatus of North Aceh Regency. Organizational commitment, the application of government accounting standards and the utilization of regional financial accounting information systems have a strong relationship with the quality of financial statements in the government apparatus of North Aceh Regency. Organizational commitment, the application of government accounting standards and the utilization of regional financial accounting information systems have the ability to explain the effect on the quality of financial statements at the government apparatus of North Aceh Regency.*

**Key Words:** *Organizational Commitment, Government Accounting Standard, Regional Financial Accounting Information System, Quality of Financial Statements.*

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014: pasal 1 ayat 6). Jika dilihat hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab (UU No. 23 Tahun 2014: pasal 1 ayat 30).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan setiap pemerintah daerah setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaporan keuangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Laporan keuangan yang berkualitas adalah dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mia Oktarina (2016), dimana

hasil hasil pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Semarang, serta penelitian Nugraeni dan M. Budiantara (2015) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah meningkatkan tingkat keterlibatan anggota organisasi. Untuk keterlibatan anggota yang lebih tinggi dalam organisasi, salah satu alternatifnya adalah dengan meningkatkan komitmen organisasi mereka. Orang dengan komitmen yang lebih tinggi akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan organisasi salah satunya adalah dengan meluangkan waktu mereka untuk memproses informasi yang tersedia untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat.

Darma dalam Noprial Valenra Maksyur (2015) menyatakan komitmen organisasi sebagai tingkat kekuatan identifikasi individu, dan keterikatan individu kepada organisasi yang memiliki ketiga karakteristik. Pertama, memiliki kepercayaan yang kuat dan menerima nilai-nilai dan tujuan perusahaan. Kedua, kemauan yang kuat untuk berusaha atau bekerja keras untuk organisasi. Ketiga, keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi

Hal ini senada dengan penelitian Noprial Valenra Maksyur (2015) yang membuktikan bahwa Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Begitu juga,

dengan hasil penelitian Dina Fitri Septarini dan Frans Papiaya (2016) yang mana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Di samping itu, kebutuhan akan laporan keuangan yang berkualitas tidak terlepas dari pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang efektif. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Komputer

merupakan salah satu komponen dari teknologi informasi, yang dapat membantu manusia dalam mempermudah pekerjaannya. Dengan meningkatnya teknologi komputer dapat mengubah pemrosesan data akuntansi secara manual menjadi otomatis.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan *auditable* (Made Ayu Darmayani, Nyoman Trisna Herawati dan Anantawikrama Tungga Atmaja, 2014).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Made Ayu Darmayani, Nyoman Trisna Herawati dan Anantawikrama Tungga Atmaja (2014) yang membuktikan bahwa Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai laporan keuangan. Di samping itu, hasil penelitian Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Erawati, Dan Ni Kadek Sinarwati (2014) membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Banyak penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat signifikansi yang berbeda-beda dari masing-masing variabel untuk kualitas laporan keuangan, dan hanya sedikit dari penelitian terdahulu yang memakai variabel komitmen organisasi. Untuk penerapan standar akuntansi pemerintahan sesuai PP No. 71 tahun

2010 yang baru diterapkan pada tahun 2015 sangat menarik untuk diteliti, untuk melihat tingkat signifikansi dengan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Mia Oktarina (2016), Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Erawati, dan Ni Kadek Sinarwati (2014) dan penelitian Dina Fitri Septarini dan Frans Papilaya (2016). Namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya dimana dalam penelitian Mia Oktarina (2016), bahwa variabel bebas terdiri dari; penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur Pemerintah Daerah, dan *good governance*. Sementara penelitian Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Erawati, dan Ni Kadek Sinarwati (2014), menganalisis mengenai kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah. Sedangkan penelitian Dina Fitri Septarini dan Frans Papilaya (2016) difokuskan pada kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen organisasi. Adapun dalam penelitian ini difokuskan pada komitmen organisasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Penelitian ini ingin memperoleh bukti empiris tentang: **"Persepsi yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara)"**

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau

valid. Informasi dalam laporan keuangan yang andal yaitu laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Menurut Slamet Munawir (2002:2) bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat memberikan informasi tentang suatu keadaan perusahaan sekaligus merupakan alat komunikasi antara data keuangan dengan pihak yang berkepentingan dengan data organisasi tersebut. Laporan keuangan sebagai hasil proses dari akuntansi merupakan penghubung antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan yaitu dengan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak tersebut untuk mengetahui keadaan dan perkembangan perusahaan bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Mia Oktarina (2016), kualitas pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- Penyajian jujur; Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- Dapat diverifikasi (*verifiability*); Informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- Netralitas informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Menurut Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara selama suatu periode. Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya: sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Syafri Sofyan Harahap (2008:201) berpendapat bahwa, laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggung jawaban atau akuntabilitas. M. Sadeli (2002:2) yang menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi historis

dan akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Irham Fahmi (2012:2) Laporan keuangan adalah produk akhir dari akuntansi yang nantinya akan dianalisa lebih lanjut oleh pihak yang berkepentingan sebelum mengambil keputusan. Sementara menurut Deddi Nordiawan (2007:151) laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaiansumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
- Neraca  
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

- Laporan Operasional  
Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- Laporan Arus Kas  
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventaris aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
- Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- Catatan atas Laporan Keuangan  
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE,

Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

## 2. Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan bernilai ekonomis. Karakteristik kualitatif keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia melalui **PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 1** (2007:7) adalah:

- Dapat dipahami  
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Informasi keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian pengguna.
- Relevan  
Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu,

masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

- Andal  
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithfull representation*) dari yang seharusnya disajikan dan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
- Dapat diperbandingkan  
Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama, atau dengan perusahaan sejenis lainnya pada periode waktu yang sama.

Karakteristik Laporan Keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 dalam Mia Oktarina (2016), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

- Relevan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi kebutuhan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini.
- Andal yaitu laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diferivikasi.
- Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya.

- Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mengetahui isi yang dimaksud dalam laporan keuangan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

### 3. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan yang disusun bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu organisasi, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan organisasi maupun secara berkala. Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah berfungsi sebagai "alat pengujian" dari pekerjaan fungsi bagian pembukuan, akan tetapi untuk selanjutnya seiring dengan perkembangan jaman, fungsi laporan keuangan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau melakukan penilaian atas posisi keuangan perusahaan tersebut. Dengan menggunakan hasil analisis tersebut.

Tujuan penyajian laporan keuangan menurut Deddi Nordiawan (2007: 86), tujuan penyajian laporan keuangan adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005:1) menjelaskan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

#### 4. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah tingkatan dimana seseorang memposisikan dirinya pada organisasi dan kemauan untuk melanjutkan upaya pencapaian kepentingan organisasinya. Individu yang memiliki komitmen yang rendah pada organisasi seringkali hanya menunggu kesempatan yang baik untuk keluar dari pekerjaan mereka (Raymod A. Noe, 2000:364). Pengertian ini memberikan gambaran bahwa Komitmen organisasi adalah bagaimana seseorang menempatkan dirinya dalam sebuah organisasi dan bagaimana seseorang memiliki kemauan untuk tetap mempertahankan dirinya dalam organisasi.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.25/KEP/M.PAN/2002 menyatakan pengertian komitmen adalah keteguhan hati, tekad yang mantap, dan janji untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang diyakini. Komitmen organisasi mencerminkan sejauh mana seorang individu Mengidentifikasi organisasi dan tujuannya.

Komitmen organisasi merupakan komponen dari pelaku. Menurut Robbins P. Steven Noprial Valenra Maksyur (2015) Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang pegawai memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya itu. Keterlibatan seseorang yang tinggi dalam suatu pekerjaan berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu, sementara komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut.

Luthans (2006:235) berpendapat bahwa komitmen organisasi cenderung didefinisikan sebagai bentuk sikap. Sikap tersebut dapat dipecah menjadi 3 komponen dasar: emosional, informasional dan berperilaku, dari 3 komponen sikap, hanya komponen itensi/keperilaku yang dapat diamati langsung. Komponen emosi dan keyakinan tidak dapat dilihat orang lain, hanya dapat diduga. Sikap dalam organisasi dianggap penting karena berpengaruh terhadap perilaku. Dan komitmen organisasional sebagai bagian dari sikap mempengaruhi berbagai perilaku penting agar organisasi berfungsi efektif.

Robbins P. Steven dalam Noprial Valenra Maksyur (2015) mengelompokkan komitmen organisasi dengan tiga indikator yang terpisah, yaitu :

- Komitmen afektif (*Affective commitment*)  
Komitmen afektif merupakan perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan di dalam nilai-nilainya. Seseorang yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja dalam

suatu organisasi karena mereka memang ingin melakukan hal tersebut.

- **Komitmen Berkelanjutan (*Continuance commitment*)**  
Komitmen berkelanjutan merupakan nilai ekonomi yang dirasakan dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Seorang pegawai mungkin bertahan dan berkomitmen dengan organisasi dan pemberi kerja karena diberi imbalan yang cukup tinggi. Komitmen ini menyebabkan seorang karyawan bertahan pada suatu organisasi karena mereka membutuhkannya.
- **Komitmen normative (*Normative commitment*)**  
Komitmen normatif merupakan kewajiban seseorang untuk bertahan di dalam suatu organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Komitmen ini menyebabkan seorang pegawai bertahan pada suatu pekerjaan karena mereka merasa wajib untuk melakukannya. Dengan kata lain, komitmen normatif ini berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam sebuah organisasi.

Komitmen afektif (*affective commitment*), komitmen berkelanjutan (*continuance commitment*), dan komitmen normatif (*normative commitment*), dapat digunakan dalam menguji komitmen organisasi pada pemerintah daerah. Seorang aparatur pemerintah daerah yang berkerja dalam suatu organisasi harus memiliki komitmen dalam menjalankan

tugasnya. Komitmen seorang aparatur pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perasaan emosional untuk organisasi juga keyakinan di dalam nilai-nilainya, nilai ekonomi yang dirasakan oleh seorang aparatur pemerintah daerah tersebut dalam bertahan di organisasinya dan juga adanya alasan-alasan moral atau etis (Robbins, 2008:103).

Luthans (2006:249) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi diantaranya, yaitu:

- Variabel orang; Variabel orang ini meliputi usia, kedudukan dalam organisasi dan diposisi seperti efektivitas positif atau negatif, atau atribusi kontrol internal dan eksternal.
- Variabel organisasi; Variabel organisasi meliputi desain pekerjaan, nilai, dukungan dan gaya kepemimpinan penyelia.
- Variabel non-organisasi; Variabel non-organisasi yaitu adanya alternatif lain setelah memutuskan untuk bergabung dengan organisasi akan mempengaruhi komitmen selanjutnya

Menurut Mowday R.T. Porter dalam Noprial Valenra Maksyur (2015) terdapat beberapa faktor penentu komitmen seseorang terhadap organisasinya:

- Komitmen organisasi dipengaruhi oleh alternatif kesempatan kerja yang dimiliki pekerja yang disebut faktor non-organisasi. Semakin besar peluang untuk berpindah kerja dan semakin besar hasratnya terhadap alternatif pekerjaan di tempat lain, komitmen pekerja pada

organisasinya cenderung semakin rendah.

- Komitmen dipengaruhi oleh beberapa aspek dalam lingkup pekerjaan itu sendiri yang disebut faktor organisasi. Faktor ini akan membentuk sikap bertanggung jawab terhadap keberhasilan tugas yang diemban.
- Komitmen pekerja pada organisasinya dipengaruhi oleh faktor karakteristik diri pekerja. Faktor ini membentuk komitmen inisial, yaitu komitmen awal yang timbul pada saat pekerja baru saja mulai masuk sebagai anggota organisasi. Seseorang yang mempunyai komitmen tinggi, pada saat mulai bekerja mempunyai kecenderungan untuk tidak berpindah pekerjaan untuk jangka waktu relatif lama. Termasuk faktor ini adalah kepuasan kerja, usia senioritas, dan lama bekerja. Semakin usia tua pekerja atau semakin lama bekerja dan semakin senior, serta semakin tinggi kepuasan terhadap pekerjaannya orang tersebut cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi.

### C. Metode Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah komitmen organisasi, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pada aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Aparatur pemerintahan merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari instansi-instansi pemerintah yang ada Kabupaten Aceh Utara. Peneliti memilih

aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Utara sebagai lokasi penelitian dengan alasan dan pertimbangan ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penelitian lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara:

- Pengamatan (Observasi) yaitu cara pengumpulan data melalui pencatatan secara cermat dan sistematis langsung di lokasi objek penelitian yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan dalam Kabupaten Aceh Utara.
- Wawancara (*Interview*)  
Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab berdasarkan tujuan penelitian kepada Kepala Pemerintahan yang menjadi responden.
- Angket (Kuesioner)  
Angket merupakan seperangkat pernyataan mengenai komitmen organisasi, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan yang dibagikan kepada responden untuk dijawab berdasarkan opsi pilihan.
- Penelitian Kepustakaan  
Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku

literatur-literatur dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan pihak terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **D. Pembahasan**

### **1. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil olah data menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Hal ini terjadi karena aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Utara belum memiliki kepercayaan yang kuat untuk membuat laporan keuangan. Di samping itu, aparatur pemerintahan belum memiliki kemauan yang kuat untuk berusaha atau bekerja keras untuk organisasi.

Aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Utara juga belum mempunyai prinsip transparan dalam mendiskusikan permasalahan keuangan mempunyai strategi pendekatan yang humanis transparan, demokratis, dan akuntabel dalam membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Selain permasalahan di atas, komitmen organisasi juga dipengaruhi oleh usia, kedudukan dalam organisasi dan diposisi seperti efektivitas positif atau negatif, atau atribusi kontrol internal dan eksternal.

Dalam perilaku organisasi, komitmen organisasi merupakan komponen dari perilaku. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya itu. Keterlibatan

seseorang yang tinggi dalam suatu pekerjaan berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu, sementara komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dina Fitri Septarini dan Frans Papilaya (2016) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan antara SPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Noprial Valenra Maksyur (2015) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara penelitian ini komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini terjadi karena aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Utara belum memiliki kepercayaan yang kuat untuk membuat laporan keuangan dan masih ada sebagian pegawai yang belum memiliki prinsip transparan dalam mendiskusikan permasalahan keuangan.

### **2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Hal ini disebabkan bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat selalu berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Dengan adanya SAP, maka laporan keuangan akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan,

andal dan dapat diperbandingkan). Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila standar akuntansi pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah baik, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan baik.

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Sehingga itu agar laporan keuangan yang disajikan berkualitas sangat diperlukan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. maka dengan adanya diterapkannya standar akuntansi pemerintah dalam penyajian laporan keuangan, maka otomatis laporan keuangan yang disajikan juga akan lebih berkualitas karena informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Mia Oktarina (2016) , dimana hasilnya menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan penelitian Nugraeni dan M. Budiantara (2015) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### **3. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi**

#### **Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Hal ini terjadi karena Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara telah memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat.

Di samping itu, dalam membuat laporan keuangan, Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara telah menggunakan teknologi informasi akuntansi keuangan daerah yang merupakan alat yang berfungsi untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan dengan mempermudah dan mempercepat serta menciptakan keakuratan hasil laporan keuangan. Apabila Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dapat memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dengan baik, maka laporan keuangan yang disajikan juga akan lebih berkualitas.

Penggunaan teknologi informasi akuntansi keuangan daerah dalam membuat laporan keuangan sangat efisien dan mudah dalam penggunaan. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam pengaplikasian sistem informasi keuangan daerah serta pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Made Ayu Darmayani, Nyoman Trisna Herawati dan Anantawikrama Tungga atmaja (2014) yang membuktikan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Secara simultan komitmen organisasi, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Komitmen organisasi, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas laporan keuangan pada Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Komitmen organisasi, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara sebesar 59,4%. Sisanya 40,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini seperti kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan lain-lain.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dapat disimpulkan bahwa :

- Secara parsial komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada aparaturn pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
- Secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada

aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.

- Secara parsial pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
- Secara simultan komitmen organisasi, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
- Komitmen organisasi, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas laporan keuangan pada Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
- Komitmen organisasi, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada Aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara sebesar 59,4%. Sisanya 40,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini seperti kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan lain-lain.

## F. Daftar Pustaka

- Deddi Nordiawan. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Dina Fitri Septarini dan Frans Papilaya. (2016). Interaksi Komitmen Organisasi Terhadap Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, VOL.VII, NO. 2, Oktober 2016; 100-116 p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723.
- Imam Ghozali.( 2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Irham Fahmi. (2012). Analisis Laporan Keuangan, Alfabeta, Bandung.
- Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Erawati, dan Ni Kadek Sinarwati. (2014). Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem Akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan Keuangan Daerah. e-Journal, Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol ume 2 No :1 Tahun 2014.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luthans. (2006). *Performance and Motivation*. New York: Prentice Hall.
- Made Ayu Darmayani, Nyoman Trisna Herawati dan Anantawikrama Tungga Atmaja. (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. e-Journal, Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol ume 2 No :1 Tahun 2014.
- Mahmudi. (2011). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Mia Oktarina. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014). *Journal Of Accounting*, Volume 2 No.2 Maret 2016, Universitas Pandanaran Semarang.
- M. Sadeli. (2002). Dasar-Dasar Akuntansi, Cetakan kedua. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhammad Gade. (2000) . Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Noprial Valenra Maksyur. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu), JOM. FEKON Vol. 2 No. 2OKTOBER 2015.
- Nugraeni dan M. Budiantara. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap

- Akuntabilitas Kinerja. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Unisnu Jepara.
- Raymond A. Noe. dkk. (2000). *Human Resource Management, Gaining A Competitive Advantage*. Third Edition. McGraw-Hill Inc, New York.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Singgih Santoso. (2002). Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Slamet Munawir. (2002). Analisa Laporan Keuangan, Yogyakarta, Liberty.
- Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: IAI.
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Cet. XIV, Bandung, Alfabeta.
- Syafri Sofyan Harahap. (2008). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta. Penerbit: Raja Grafindo Persada.

